Kementerian PPN/
Bappenas

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

Laporan Tahunan

2023

ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

kata pengantar

Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc

Ketua Majelis Wali Amanat ICCTF
Deputi Bidang Kemaritiman
dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/ Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas memiliki fungsi sebagai enabler program pembangunan yang memungkinkan terwujudnya pembangunan serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan. Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, terdapat Prioritas Nasional (PN) yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan laut dan pesisir. Prioritas nasional tersebut terdapat pada PN 1 yakni memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai negara maritim, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor penting penggerak pembangunan. Indonesia Climate Change Trust Fund, sebagai Satuan Kerja di bawah Kementerian PPN/ Bappenas, mempunyai mandat untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi dan memitigasi masalah perubahan iklim, serta terus melakukan aksi nyata untuk menghasilkan model inovasi pembangunan di seluruh sektor kemaritiman dan sumber daya alam, menuju sektor yang kokoh dan lepas dari kerentanan.

ICCTF mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim, sebagaimana tertera dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang disampaikan pada Tahun 2015 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada Tahun 2030. Komitmen tersebut juga selaras dengan upaya Indonesia untuk merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Inovasi yang dilakukan dapat menciptakan keseimbangan antara pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial menjadi sangat penting. Dalam upaya hal tersebut, perlu adanya konsistensi dalam upaya memelihara keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan.

Laporan tahunan ICCTF ini merupakan kumpulan dokumentasi dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan dalam tahun 2023 seperti kegiatan COREMAP-CTI Asian Development Bank, LAUTRA, Blue Carbon, Aquaculture, kajian strategis lain, serta kesekretariatan. Laporan ini juga mengulas hasil pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan inovasi, kekurangan dan tantangan dalam mewujudkan resiliensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Semoga laporan ini bisa bermanfaat sebagai media pembelajaran bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pembangunan di Indonesia.

prakata

Moh Rahmat Mulianda

Direktur Kelautan dan Perikanan

Kementerian PPN/ Bappenas

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan laut dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, ICCTF berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan program berbasis laut yang mana mendukung tujuan SDGs ke-14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya dalam pencapaian pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan pembangunan perikanan melalui pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Salah satu upaya yang dilakukan ICCTF dalam mendukung arah kebijakan pemerintah adalah dengan melestarikan keanekaragaman hayati di daerah pesisir dan laut, termasuk terumbu karang dan ekosistem karbon biru (mangrove dan lamun) secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, ICCTF sebagai lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim terus berkembang dan berkontribusi terhadap tujuan nasional di bidang perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional dalam mempromosikan inisiatif Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Tahun 2023, ICCTF menyelesaikan salah satu proyek yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 yaitu Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan sumber dana yang berasal dari Asian Development Bank (ADB). Proyek ini dilaksanakan di 2 provinsi di Indonesia yaitu Nusa Tenggara Barat, dan Bali dengan tujuan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan masayarakat dan pengelola kawasan.

Selain proyek COREMAP-CTI, ICCTF juga melaksanakan proyek *Support for The Integration of Blue Carbon Ecosystem in Indonesia's Biodiversity and Climate Policies* yang pendanaan nya bersumber dari AFD pemerintah Perancis. Selain itu, ICCTF juga telah melaksanakan proyek *oceans for prosperity project* – LAUTRA yang bersumber dari ProBlue Wolrd Bank, serta beberapa kajian strategis terkait kajian neraca sumber daya laut. Pada tahun 2023, ICCTF juga telah mempersiapkan proyek hibah Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk sector budidaya dengan pendanaannya bersumber dari Asian Development bank. Mewakili Sekretariat ICCTF, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan dan capaian ICCTF di tahun 2023, khususnya kepada Majelis Wali Amanat, pemerintah pusat dan daerah, Kementerian/Lembaga terkait, lembaga donor, mitra pelaksana, dan seluruh manajemen serta staf ICCTF.

Saya yakin bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh ICCTF dapat mendukung implementasi kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah dan menghasilkan inovasi berupa tata kelola maupun rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan dampak ke wilayah lainnya serta memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat setempat.

Laporan Tahunan ICCTF 2023 dapat digunakan untuk berbagi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan sebagai media pembelajaran dalam penanganan isu perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat terus mendukung ICCTF untuk melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun dari para pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja ICCTF ke depannya.

Terima kasih.

VISI DAN MISI
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

VISI

Mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi GRK melalui gerakan menuju ekonomi rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

MISI

Mengintegrasikan permasalahan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

MISI

Melaksanakan inisiatif mitigasi dan adaptasi dalam konteks penurunan emisi GRK.

ringkasan eksekutif

Dr. Tonny Wagey

Executive Director

Indonesia Climate Change Trust Fund -

Kementerian PPN/ Bappenas

Sepanjang kurun waktu 2023, berbagai capaian telah dihasilkan oleh ICCTF sebagai upaya mendukung pemerintah dalam upaya penanganan perubahan iklim. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor. 111 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia / Indonesia Climate Change Trust Fund, di dalam strukturnya, Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF didukung oleh tiga Kelompok Kerja, dengan masing-masing pendekatan tematik dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. Kelompok Kerja (Pokja) I menangani bidang program dan kegiatan strategis serta inovasi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan dan lahan gambut, industri, transportasi, dan limbah. Pokja II mengatur bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor energi baru dan terbarukan, dan Pokja III pada bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2023, proyek COREMAP-CTI ADB telah selesai dilaksanakan ditandai dengan adanya proses penutupan proyek yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Sebelum dilaksanakan penutupan proyek COREMAP-CTI ADB, beberapa capaian yang dihasilkan seperti terlaksananya 11 kegiatan peningkatan kapasitas baik secara nasional maupun international. Jumlah peserta yang dilibatkan dalam peningkatan kapasitas tersebut sebanyak 252 dengan komposisi 170 laki laki dan 82 perempuan. Selain itu, pada tahun 2023 ICCTF telah mengelola salah satu hibah untuk kegiatan blue finance yang bersumber dari World Bank. *Grant agreement* hibah tersebut telah di tandatangani pada bulan April dan mulai efektif pada bulan Mei 2023.

ICCTF selain mengelola hibah terencana, juga telah mengelola hibah langsung uang yang bersumber dari Agence Française de Dévelopement (AFD), Perancis untuk melaksanakan kegiatan *Blue carbon*. Capaian yang dihasilkan dari *project blue carbon* selama tahun 2023 adalah terlaksananya kick of meeting sebagai langkah awal untuk memperkenalkan kepada stakeholder terkait rancana implementasi proyek serta jalannya koordinasi yang rutin dengan stakeholder terkait. Selain itu, ICCTF dengan pendanaan rupiah murni, pada tahun 2023 telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis terutama peningkatan kapasitas yang melibatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pengelolaan Kawasan konservasi.

Demikian pula untuk sektor pangan dan pertanian, sesuai arahan Deputi Kemaritiman Sumber Daya Alam (KSDA) yang juga merupakan ketua majelis wali amanat ICCTF, mendorong agar ICCTF ikut terlibat dalam proyek penyaluran bantuan langsung petani (BLP). Kegiatan ini masuk dalam implementasi adaptasi perubahan iklim yang merupakan salah satu fokus area ICCTF. Kegiatan awal untuk kegiatan BLP sudah dimulai di akhir tahun 2023.

Dengan perkembangan dan capaian-capaian yang telah diraih, ICCTF, dengan dukungan Bappenas optimis dapat berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Pembelajaran penting juga telah diidentifikasi untuk pelaksanaan dan pengelolaan program yang lebih baik di tahun 2024.

capaian ICCTF dalam angka 2023

Pelatihan dan Sertifikasi

595
Orang

♂ **407** Laki-Laki ♀ **187** Perempuan

Potensi Penyerapan Karbon

25 TAHUN KEDEPAN

13.922.062,5
Ton CO_2-eq

3 Potential New Project

Communication

88
Berita Publish

17
Media Nasional

16
Media Lokal

Publikasi Dokumen

1 KEBIJAKAN *BLUE FINANCE ADVISORY COMMITTEE*

1 BUKU TERUMBU KARANG INDONESIA: SEKARANG DAN MASA DEPAN. PEMBELAJARAN DARI COREMAP-CTI

Penghargaan ICCTF 2023

2023 *PROJECT IMPLEMENTATION AWARDS:*

1 OUTSTANDING FINANCIAL MANAGEMENT IMPLEMENTATION

ADB

2023 Project Implementation Awards

is awarded to

Grant 0379-INO: Coral Reef Rehabilitation and Management-Coral Triangle Initiative Project

for Outstanding Financial Management Implementation in 2023

In recognition for active seeking clarifications during the financial statement preparation stages on ADB requirements and for strong financial management capacity, resulting in a good quality audit report (APFS) which required no further clarifications

Given this 28th of March 2024

Joris G. Van Etten
Country Operations Head

Jiro Tominaga
Country Director

2 OUTSTANDING GENDER IMPLEMENTATION

ICCTF 2023

Capaian Audit

Lokasi proyek

19
Proyek di Kalimantan

23
Proyek di Sumatera

36
Proyek di Jawa

114
Total Projects
29 Province
9.4 Mton CO_2-eq reduction

6 Proyek di Sulawesi
9 Proyek di Maluku - Papua
21 Proyek di Bali - Nusa Tenggara

BENANG MERAH PROGRAM ICCTF

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dibentuk pada tahun 2009 oleh Pemerintah Indonesia sebagai lembaga pendanaan perubahan iklim yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan menyalurkan dana dalam mendukung kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

benang merah program ICCTF

ICCTF terus melakukan upaya melalui implementasi program dan proyek pilot dalam rangka menekan emisi gas rumah kaca serta aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui 4 (empat) area fokus (*window*), yaitu *land-based window, energy window, adaptation and resilience window*, serta *marine-based window*. *Marine-based window* menjadi salah satu fokus area pada tahun 2018 untuk penanganan perubahan iklim pada ekosistem karbon biru yang didukung dengan diterbitkannya Kepmen Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor: 111 Tahun 2018, dimana dalam struktur Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF terdapat 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:

Pokja I Bidang Lingkungan Hidup

Pokja II Bidang Energi Terbarukan

Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan

Sejak tahun 2020, kegiatan ICCTF terfokus pada *Marine based window* dengan pendanaan dari Rupiah Murni APBN dan hibah. Fokus kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh ICCTF pada tahun 2023 adalah:

COREMAP-CTI

merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program COREMAP-CTI ADB juga mendanai 6 (enam) program yang berlokasi di Nusa Penida – Bali serta Gili Matra dan Gili Balu – NTB, termasuk kegiatan kajian *Supply Chain Tuna, Snapper* dan *Seaweed*, serta beasiswa *Master Degree Program* (S2);

BLUE FINANCE

merupakan salah satu inovasi strategi untuk pendanaan pesisir dan laut khususnya pendanaan inovatif untuk investasi yang mendukung target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru dan *Blue Finance Policy Note* yang dapat mendukung penerbitan pendanaan berkelanjutan untuk sektor biru; serta penyusunan strategi investasi pendanaan biru melalui proyek *Ocean for Prosperity* - LAUTRA

Blue Carbon

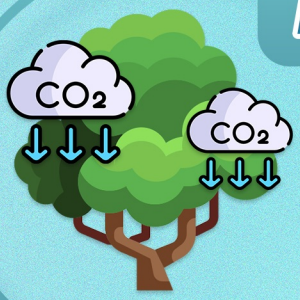

merupakan salah satu kegiatan untuk mengintegrasikan karbon biru ke dalam kebijakan nasional dan daerah melalui penerapan *Indonesian Blue Carbon Strategic Framework* (IBCSF); menyusunan roadmap, baseline nasional dan MRV (*Monitoring, Reporting, and Verification*) karbon biru; serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan nasional dan sub-nasional terkait dengan kebijakan karbon biru.

Towards Sustainable and Conversion - Free Aquaculture in Southeast Asia

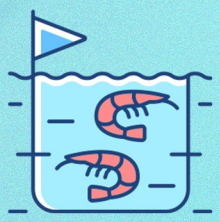

Regional Proyek (Indonesia dan Timor Leste). Indonesia fokus pada komoditas udang yaitu untuk memperluas *supply chain*/ infrastruktur udang, dan Timor-Leste untuk rumput laut.

Proyek ini merupakan pendamping proyek *Loan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project* (IISAP) yang dilaksanakan oleh DJPB-KKP.

Kajian Strategis

lainnya dalam windows kelautan dan perikanan seperti kajian neraca sumber daya laut, peningkatan kapasitas pengelola Kawasan konservasi melalui sertifikasi SK3 penilai kondisi terumbu karang, lokakarya pengembangan konektivitas jalur transportasi dan logistik perikanan di WPPNRI 718, dan *blue food forum.*

manajemen keuangan

Sumber pendanaan ICCTF dalam kurun waktu 2015 – 2023 bersumber dari;

APBN

HIBAH

Sumber Dana Hibah ICCTF

Total alokasi pendanaan

bersumber dari APBN dan hibah dalam kurun waktu 2015 -2023

2015

2023

Total alokasi pendanaan yang bersumber dari APBN dan hibah dalam kurun waktu 2015-2023 (8 tahun), diperoleh gambaran bahwa proporsi APBN terhadap hibah yang diterima pemerintah Indonesia melalui ICCTF adalah sebesar Rp. 522 M.

APBN
96.000.000.000

HIBAH
(USAID, UKCCU, DANIDA, World Bank & ADB)
426.000.000.000

TOTAL
522.000.000.000

Total Realisasi Anggaran ICCTF Tahun 2023

APBN

99,6%

Alokasi Anggaran Tahun 2023

11.835.000.000

Realisasi Anggaran Tahun 2023

11.791.055.078

Hibah Luar Negeri

97,9%

Alokasi Anggaran Tahun 2023

15.250.106.000

Realisasi Anggaran Tahun 2023

14.940.550.787

Satker Bappenas

93,2%

Alokasi Anggaran Tahun 2023

165.000.000

Realisasi Anggaran Tahun 2023

153.835.237

TOTAL

Alokasi Anggaran Tahun 2023

27.250.106.000

Realisasi Anggaran Tahun 2023

26.885.441.102

98,66%

Rincian Realisasi Anggaran ICCTF Tahun 2023

Pada Tahun 2022, realisasi anggaran ICCTF sebesar 92,71%, sedangkan pada Tahun 2023, realisasi anggaran ICCTF sebesar 98,66%.

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2023

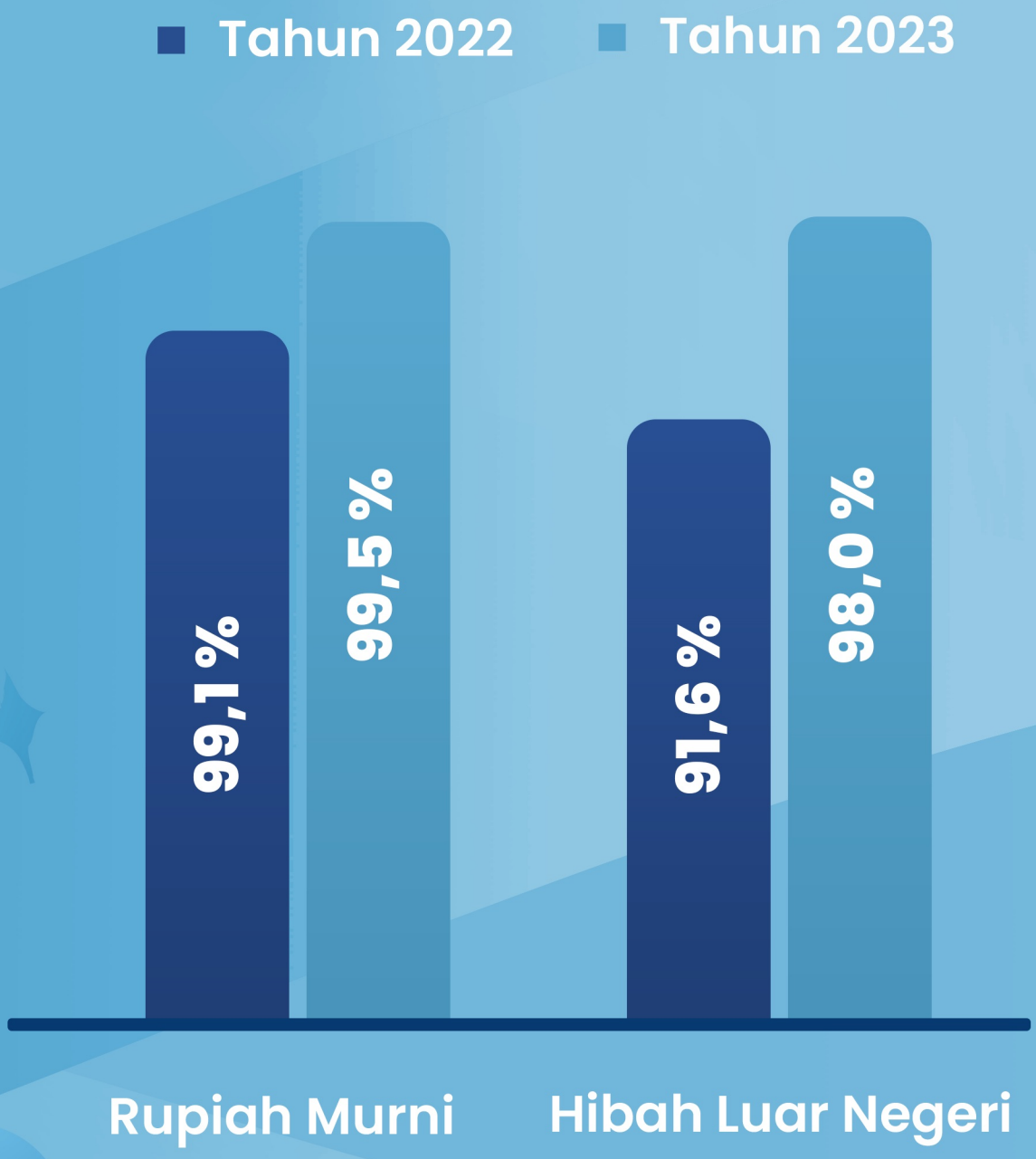

Laporan Audit 2023

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun anggaran 2023 ini telah dilakukan audit khusus untuk Hibah COREMAP-CTI World Bank T.A 2021 dan tahun 2022 dan COREMAP-CTI Asian Development Bank TA. 2021 dan tahun 2022. Laporan Keuangan Audited 2021 telah disusun oleh BPK di tahun 2022. BPK telah mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Hibah COREMAP-CTI World Bank dan Asian Development Bank Tahun Anggaran 2021 dan hasil tersebut telah disampaikan ke Donor yaitu World Bank dan Asian Development Bank dan telah mendapatkan persetujuan (*accepted*) dari donor.

Pemeriksaan BPK untuk peralatan yang diserahterimakan ke masyarakat (kiri) dan pengukuran bangunan menara pokmaswas (kanan)

Pada tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan laporan keuangan, telah dilakukan Audit oleh BPK terkait pelaksanaan proyek di setiap lokasi proyek COREMAP CTI World Bank maupun COREMAP CTI ADB. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari proyek telah tepat sasaran kepada penerima manfaat, serta sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang telah di susun. Hasil audit memperlihatkan bahwa tidak ada isu, atau ketidaksesuaian yang besar antara laporan dengan realisasi di setiap lokasi proyek.

Team ICCTF 2023

TEAM ICCTF 2023

GABRIEL A. WAGEY
EXECUTIVE DIRECTOR ICCTF

FEBRUANTY S PURNOMO
PROGRAM MANAGER

MEGA GUSTI RAMA
OPERATION AND GRANT MANAGER

LEONAS CHATIM
TEAM LEADER
COREMAP-CTI ADB

M. WILDAN
KNOWLEDGE MANAGEMENT OFFICER

ALYA PRIMA
FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST LAUTRA

ADY SUSILO
PROCUREMENT SPECIALIST LAUTRA

SIWI HANDINAH
GENERAL ADMINISTRATION & HR COORDINATOR

ANGGRI HERAVANTHI
ACCOUNTING SPECIALIST

NANDA SACHRA YULIAWATI
MONEV SPECIALIST
COREMAP-CTI ADB

STEVEN
PME OFFICER

SHARAH
MONEV SPECIALIST LAUTRA

SUSI RUSMIATI
PROGRAM OFFICER LAUTRA

NEYLA SYAFIRA
PROCUREMENT OFFICER

EKO WAHYUDI
PROJECT FINANCE OFFICER

DERICK PRAWIRA
CREATIVE OFFICER
COREMAP-CTI ADB

AMRULLAH ROSADI
TECHNICAL PROJECT OFFICER

KAULINA
ADMIN OFFICER LAUTRA

HASNAH
FINANCE & ADMINISTRATION OFFICER BLUE CARBON AFD

AGUS SALIM
OFFICE ASSISTANT

SUGIHATONO
LOGISTIC OFFICER

JOSHUA A
PROGRAM OFFICER

YADI
DRIVER

BUDIYANTO
DRIVER

TOTAL
SUMBER DAYA MANUSIA
28 ORANG

PENUGASAN
TIME-BASED
25 ORANG

PENUGASAN
OUTPUT-BASED
3 ORANG

HINGGA BULAN
DESEMBER 2023

8 ORANG
MENYELESAIKAN KONTRAK

AKHIR TAHUN
DESEMBER 2023

20 ORANG
JUMLAH SDM ICCTF

LAND BASED MITIGATION

Window mitigasi berbasis lahan bertujuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca melalui dukungan pembiayaan terhadap kegiatan reforestasi, rehabilitasi dan restorasi lahan terdegradasi menjadi hutan masyarakat, agroforestri, atau kebun energi, pengelolaan lahan gambut rendah emisi dan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Progress dan Capaian Program

Tahun 2023

Mitigasi berbasis Lahan (*Land based Mitigation*)

Sepanjang tahun 2023, ICCTF memiliki kegiatan mitigasi yang dilaksanakan pada 2 proyek hibah yakni COREMAP-CTI dan *Blue Carbon*.

Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dan Lamun

Melalui proyek COREMAP-CTI WB dan ADB, ICCTF telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove dan lamun. Kegiatan rehabilitasi dalam proyek ini dilaksanakan oleh mitra pelaksana PKPSL di Yensawai, PT. Sucofindo di Gili Balu dan CTC di Nusa Penida. Rehabilitasi dilakukan dengan menanam mangrove dan lamun.

Luas lokasi Rehabilitasi Mangrove
38.000 m²

Luas lokasi Rehabilitasi Lamun
500 m²

Perhitungan Potensi Penyerapan Karbon di Lokasi proyek ICCTF Tahun 2023

ICCTF memiliki mandat untuk mendukung pemerintah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, sesuai dengan target yang dicanangkan dalam *National Determined Contribution* (NDC), yaitu sebesar 31,89% dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Penurunan emisi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan melalui dukungan hibah.

Sejak tahun 2020 sampai 2023, ICCTF melalui hibah proyek COREMAP-CTI World Bank dan Asia Development Bank telah melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi melalui kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan di Desa Yensawai Raja Ampat, Gili Balu NTB dan Nusa Penida Bali.

Total jumlah bibit mangrove yang di rehabilitasi pada 3 lokasi

45.275 bibit

Asumsi 1 pohon mangrove menyerap

12.3 kg CO_2-eq

(*Eden Reforestation Project*)

POTENSI PENYERAPAN KARBON
13.922.062,5 TON CO_2-eq
UNTUK 25 TAHUN KEDEPAN

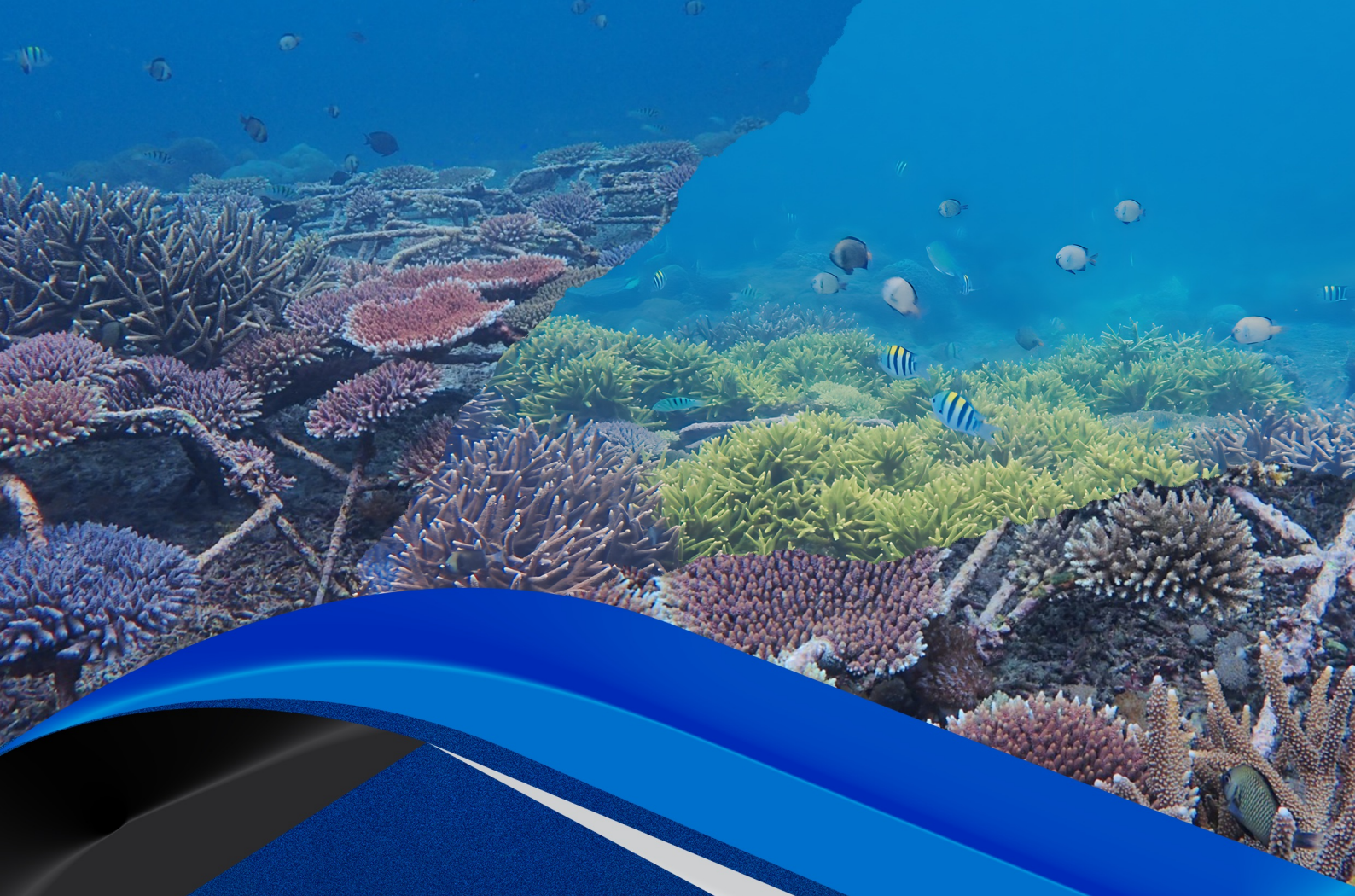

ADAPTATION AND RESILIENCE

Window adaptasi dan ketangguhan bertujuan untuk mempersiapkan institusi nasional dan daerah, serta komunitas rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui dukungan terhadap penyusunan kebijakan, penyebaran informasi iklim, pengembangan dan peningkatan desain strategi adaptasi, penggunaan teknologi dan pengetahuan yang tepat.

KEGIATAN TRANSPLANTASI KARANG DI DESA PED, NUSA PENIDA MEMBERI HARAPAN BARU

Pada tahun 2023, hasil Analisa tutupan karang di Desa Ped Nusa Penida memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari kondisi sebelumnya. Kegiatan ini di inisiasi sejak agustus 2022 dengan menggunakan media *reef star* di Desa Ped, Nusa Penida Bali. *Reef star* di pasang pada beberapa titik yang memiliki kondisi terumbu karang rusak dengan kedalaman sekitar 5 meter. Transplantasi karang yang berhasil dilakukan sebanyak 200 *reef star* dengan 300 *fragmen* karang.

Before

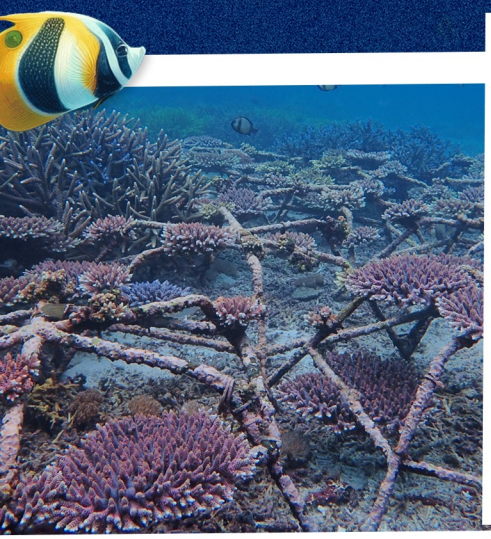

After

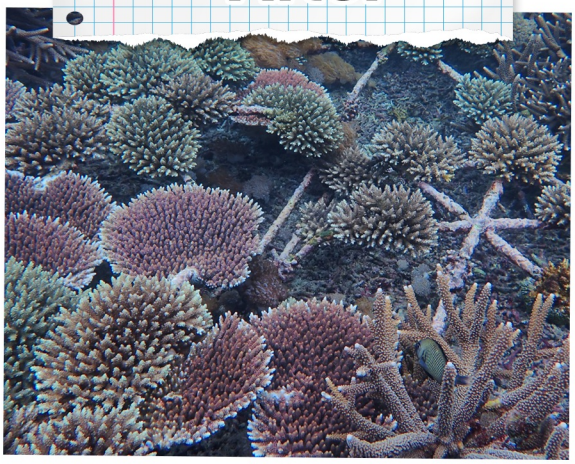

Capaian

Adaptasi dan Ketangguhan ICCTF 2023

01 **Pelatihan Pembiayaan Berkelanjutan Pengelolaan MPA melalui PES**

02 **Pembentukan *Blue Finance Advisory Committee* (BFAC)**

03 ***Blue Carbon Foundation Course* dan *Training of Trainer Course***

04 ***International on-Board Training Seagrass Mapping and Livelihoods***

05 Pelatihan dan Sertifikasi SK3 Penilai Terumbu Karang

06 Lokakarya Neraca SDL dan SDI

07 Pengembangan Konektivitas Jalur Transportasi dan Logistik Perikanan di WPPNRI 718

08 *Blue Food Forum*

Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi yang dilakukan diharapkan mendorong dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Lembaga/ institusi dalam pengembangan desain strategi adaptasi melalui kegiatan penelitian, kerjasama serta sertifikasi SDM terutama pengelola kawasan konservasi

ENERGY

Window energi bertujuan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca melalui penggunaan teknologi energi rendah karbon, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan, serta konservasi dan efisiensi energi.

Indonesia Development Forum 2023

Advancing Blue Economy Innovation and Collaboration

IDF 2023 berfokus pada pembangunan ekonomi biru, dengan mengangkat tema "*Advancing Blue Economy Innovation and Collaboration*." Tema ini diharapkan dapat memunculkan gagasan dan terobosan ide pembangunan ekonomi biru dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang bernilai ekonomi tinggi, mensejahterakan masyarakat pesisir, dan tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan. Pembahasan tema IDF 2023 secara lebih rinci dituangkan dalam empat subtema:

(i) Subtema 1 "*Transforming Blue Jewel of Indonesia*"

(ii) Subtema 2 "Mendorong Konektivitas Antar Kepulauan Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Biru"

(iii) Subtema 3 "*Progressing Blue Economy*"

(iv) Subtema 4 "*Promoting Inclusion in Indonesia's Blue Economy*".

Hasilnya diharapkan dapat melengkapi, memperkuat, dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi biru sehingga mampu mendorong transformasi ekonomi di Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan sebagai masukan dalam RPJMN 2025-2029.

Indonesia telah berkomitmen memulai transisi energi untuk mencapai *Net Zero Emission*. Komiten NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat serta meningkatkan ambisi target NZE melalui *Enhanced* NDC (upaya nasional 31.89%/917 MTon CO_2-eq; dukungan international 42.20% / 1,114 MTon CO_2-eq).

Beberapa upaya kebijakan yang dilakukan seperti:

- Peraturan Presiden 112/2022 memandatkan pengurangan emisi yang bersumber dari batu bara.
- Kebijakan ketentuan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) yaitu merevisi ketentuan kandungan lokal *industry* solar untuk memfasilitasi pembangunan berbagai proyek solar.

ICCTF sebagai organisasi yang memiliki peran dalam menurunkan GRK dengan pengembangan teknologi rendah karbon, maka melalui kegiatan IDF tersebut ICCTF-Bappenas mengangkat isu terkait inovasi teknologi untuk energi baru terbarukan dari laut, serta potensi pendanaan inovatif kemaritiman sebagai inovasi dalam mendukung transformasi maritim menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan penurunan GRK melalui penggunaan teknologi energi rendah karbon, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan maka diperlukan kolaborasi dari semua pihak baik local maupun international. Dalam kegiatan ini telah melibatkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Akademisi, swasta dan *private sector.*

Tantangan pengembangan energi laut terbarukan adalah:

- Kurangnya data dan informasi yang memadai
- Keterbatasan pendanaan; riset kelautan dan kemaritiman membutuhkan biaya yang tinggi
- Faktor perubahan iklim dan lingkungan
- Kolaborasi banyak pihak: riset kelautan dan kemaritiman membutuhkan keterlibatan banyak pihak sehingga koordinasinya sering menjadi lebih rumit/kompleks.
- Masalah hukum dan kebijakan: kebijakan yang tidak konsisten serta kurangnya kerangka hukum yang jelas.

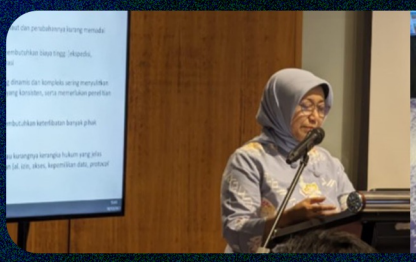

Potensi *Ocean Renewable Energy*

Dalam rangka pengembangan program yang mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ICCTF dengan bersama dengan Universitas Sam Ratulangi, Manado telah melaksanakan diskusi terkait potensi *Ocean Renewable Energy* di Selat Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara. *Ocean Renewable Energy* merupakan salah satu isu strategis dalam RPJMN 2025 – 2029.

Sejak tahun 2010 ICCTF sebagai organisasi yang mendukung Pemerintah Indonesia telah aktif mengembangkan proyek untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK. Terdapat beberapa proyek yang telah dilaksanakan dibeberapa lokasi di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta

Tantangan kegiatan *Ocean Renewable Energy* di Sulawesi Utara adalah kurangnya data dan informasi sehingga diperlukan diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya Akademisi Sulawesi Utara untuk mengumpulkan data dan informasi potensi energi terbarukan dari laut. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk menghasilkan listrik, serta mekanisme penyimpanan energi listrik merupakan tantangan untuk pengembangan *Ocean Renewable Energy.*

Berdasarkan data Kementerian ESDM, 2022 menunjukkan bahwa total potensi energi arus laut dari beberapa lokasi di Indonesia adalah *theoretical resource* 142,972,306.68 kW, *Technical resource* 57,188,922.67 kW dan *Practical resource* 20,016,122.94 Kw.

KELAUTAN (MARINE BASED)

Window kelautan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan serta konservasi keanekaragaman hayati pada kawasan pesisir, termasuk ekosistem terumbu karang dan *blue carbon* seperti mangrove dan lamun.

COREMAP-CTI

COREMAP-CTI ADB dilaksanakan di Lesser Sunda yang memiliki keanekaragaman hayati kelautan yang tinggi, terdapat 76% spesies karang dan 2.631 spesies ikan karang. Bentang laut Lesser Sunda juga merupakan jalur migrasi *family* Sirenia, Cetacea dan juga 6 spesies penyu dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. COREMAP-CTI ADB dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di Nusa Penida, Bali, serta Gili Matra dan Gili Balu, NTB.

CAPAIAN

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Tujuan

Peningkatan kapasitas yang dilakukan bertujuan untuk mendukung sumberdaya dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia

Nasional

- Pembiayaan Berkelanjutan Pengelolaan Kawasan Konservasi melalui PES
- Pelatihan *Marine Stewardship Council (MSC)* komoditas udang
- Lokakarya Strategis Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan
- Pelatihan dan sertifikasi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Teknis
- Pelatihan Sistem Pengelolaan Wisata dan Sistem Pengawasan Terpadu
- Pelatihan masyarakat untuk pemandu wisata

International

- *5th International Marine Protected Area Congress (IMPAC5)*
- Pengelolaan perikanan berkelanjutan di Jepang
- *Exchange Knowledge in Marine Protected Areas and Sustainable Fisheries Management* di Australia
- *Exchange Knowledge in Marine Protected Areas and Sustainable Fisheries Management* di Selandia Baru
- *Exchange knowledge* tentang pengelolaan Kawasan konservasi perairan di Sabah, Malaysia

DUKUNGAN PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH INDONESIA BARAT

- Tiga Kawasan Konservasi (Batam, Natuna, Lingga) di wilayah proyek awal COREMAP-CTI belum ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena belum dilakukan revisi rencana zonasi.
- Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung revisi rencana pengelolaan melalui konsultasi dan serangkaian lokakarya dengan harapan berupa rancangan Rencana Pengelolaan yang dapat diusulkan ke KKP
- 3 kawasan konservasi daerah Kota Batam, Kab Natuna dan Kab Lingga telah di revisi zonasi Kawasan.

CAPAIAN

PENUTUPAN DAN DISEMINASI HASIL PROJECT

- Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendiseminasikan pencapaian proyek dan pembelajaran dari COREMAP-CTI ADB kepada para pemangku kepentingan, mensosialisasikan/menyampaikan hasil diskusi exit strategy untuk strategi keberlanjutan program kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, dan juga sebagai upacara simbolis berakhirnya proyek COREMAP-CTI ADB.

- Kegiatan ini menyampaikan bahwa implementasi COREMAP-CTI ADB ini telah menghasilkan inovasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan juga perlindungan sumber daya hayati dan konsep partisipatif pengelolaan Kawasan Konservasi dan perlindungan sumber daya hayati.

- Salah satu strategi pengelolaan untuk menangani dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir dan laut adalah melalui program COREMAP-CTI. Hasil dari kegiatan ini menggambarkan bahwa masyarakat lokal sangat terbantu karena bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap potensi dari ekosistem daerah mereka untuk dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.

LESSON LEARNED

- Proyek perlu memastikan keberlanjutan pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan berdasarkan praktik terbaik agar tetap terjaga dan mudah diakses. Hal ini termasuk menyediakan data dan informasi untuk memenuhi tanggung jawab perjanjian upaya perlindungan.

- Proyek menghadapi permasalahan dalam memastikan pemanfaatan aset proyek secara berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten. Serangkaian konsultasi dan pelatihan telah dilakukan untuk membangun komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran tahunan guna memastikan keberlanjutan seperti dalam strategi keluar dari penutupan proyek.

- Dukungan mitra pelaksana, KKP melalui BKKPN, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa), dan CSR untuk keberlanjutan melalui sumber pendanaan lain yang ada sangat diperlukan sehingga penerima manfaat juga perlu terlibat aktif dalam penggalangan dana.

SUPPORT FOR THE INTEGRATION OF BLUE CARBON ECOSYSTEM IN INDONESIA'S BIODIVERSITY AND CLIMATE POLICIES – AFD, PRANCIS

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *Agence Francaise de Developpement (AFD)* berkomitmen untuk lebih memperkuat kebijakan karbon biru dan melaksanakan IBCSF melalui the *Blue Carbon 2050 Facility Project.* Tujuan dari proyek ini adalah untuk memasukkan pengelolaan ekosistem karbon biru ke dalam kebijakan keanekaragaman hayati dan iklim Indonesia untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Proyek ini memiliki dua keluaran sebagai berikut:

OUTCOME 1

Integrasi karbon biru ke dalam kebijakan nasional dan sub-nasional melalui penerapan Kerangka Kebijakan Karbon Biru Indonesia (IBCSF)

OUTCOME 2

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan nasional dan daerah dalam hal *baseline*, inventarisasi, dan MRV

CAPAIAN

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Bappenas dan ICCTF secara aktif terlibat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan proyek melalui inisiatif pelibatan pemangku kepentingan.

- Melalui *Kick of Meeting* serta sosialisasi sebanyak 129 *stakeholder* (35% perempuan dan 65% laki laki) yang terlibat

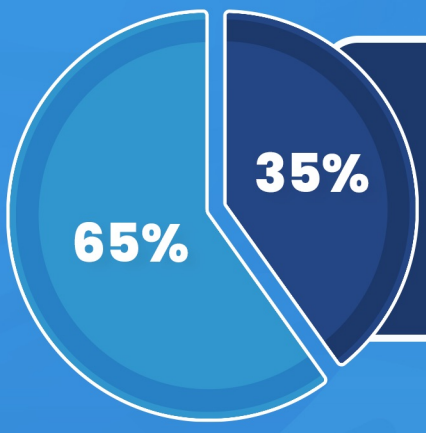

Inisiatif keterlibatan pemangku kepentingan ini menyoroti kekuatan keterlibatan dan kolaborasi masyarakat. Singkatnya, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan yang komprehensif ini tidak hanya meletakkan dasar bagi keberhasilan pelaksanaan proyek namun juga menunjukkan komitmen Bappenas dan ICCTF terhadap proses pengambilan keputusan yang kolaboratif dan terinformasi.

OCEANS FOR PROSPERITY PROJECT – LAUTRA

Proyek LAUTRA bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan, data, dan sistem informasi pemerintah, serta mendorong kebijakan yang memungkinkan pemanfaatan keuangan biru untuk meningkatkan pengelolaan dan penghidupan pesisir dan laut.

CAPAIAN

TERBENTUKNYA *BLUE FINANCE ADVISORY COMMITTEE* (BFAC)

melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Negara Peraturan Bappenas Nomor 146/M.PPN/HK/11/2023

Tujuan pembentukan tim koordinasi strategis ini adalah

(i) Melaksanakan program dan kegiatan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan pendanaan biru berkelanjutan;

(ii) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan pendanaan biru berkelanjutan baik di pusat maupun di daerah

(iii) Melakukan monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan pendanaan biru berkelanjutan

(iv) Menyusun laporan pelaksanaan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan pendanaan biru berkelanjutan untuk disampaikan kepada penanggung jawab.

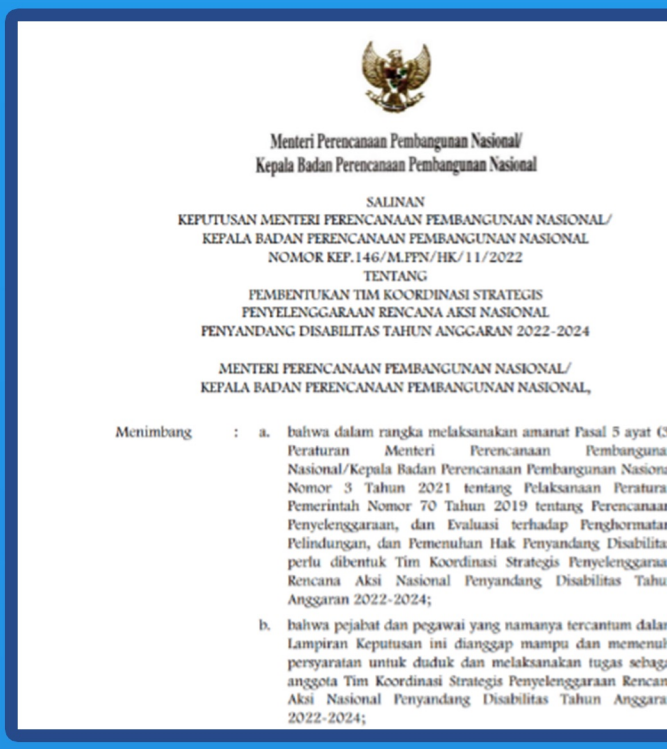

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.146/M.PPN/HK/11/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI NASIONAL
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2022-2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penyelenggaraan
Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun
Anggaran 2022-2024;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
anggota Tim Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Rencana
Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran
2022-2024;

TIM PENGARAH DAN PELAKSANA

Kementerian PPN/ Bappenas

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

OTORITAS JASA KEUANGAN

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

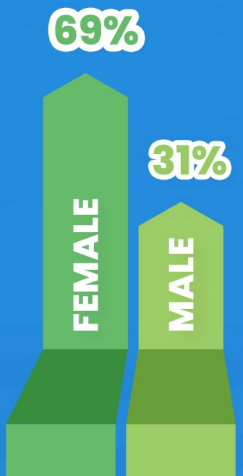

melalui kegiatan sosialisai implementasi komponen 3 Proyek LAUTRA sebanyak 175 peserta dengan jumlah perempuan 31% dan laki laki 69% yang terlibat.

Perlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan memastikan partisipasi penuh dan setara dalam semua sektor kehidupan. Perlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan penting ini mencerminkan kesadaran dan dedikasi untuk meningkatkan representasi yang lebih seimbang dan beragam untuk memperoleh perspektif dan pengalaman yang beragam

TOWARDS SUSTAINABLE AND CONVERSION-FREE AQUACULTURE IN SOUTHEAST ASIA

Hibah *Towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia* merupakan pendamping proyek Loan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP. Proyek ini merupakan Regional Proyek antara Indonesia dan Timur Leste. Kegiatan utama di Indonesia akan fokus pada komoditas udang, yaitu memperluas *supply chain*/infrastruktur udang, sementara di Timor-Leste akan fokus pada rumput laut.

TOTAL ANGGARAN UNTUK INDONESIA

3 JUTA USD
(BAPPENAS DAN KKP)

1,8 JUTA USD
(KKP)

1,2 JUTA USD
(BAPPENAS)

CAPAIAN

- **PEMBAHASAN *MODALITY***
- **KLARIFIKASI UNTUK ALOKASI BIAYA**
- **METODE PENGADAAN DAN PENGELOMPOKAN PAKET PENGADAAN**
- **KLARIFIKASI UNTUK KATEGORI *GRANT* SEPERTI *LOCAL CONSULTANT***

PENJANGKAUAN KOMUNIKASI

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian PPN/Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Media Sosial ICCTF

1200 Pengikut

Indonesia Climate Change Trust Fund

3539 Pengikut

@ICCTFOFFICIAL

WEBSITE ICCTF SELAMA TAHUN 2023

DIKUNJUNGI 37.770 PENGUNJUNG

JUMLAH 91.536 PENGUNJUNG

617 Pengikut

@ICCTFOFFICIAL

231 *Subscriber*

@ICCTFOFFICIAL

MEDIA ENGAGEMENT

NASIONAL

64 MEDIA PUBLICATION

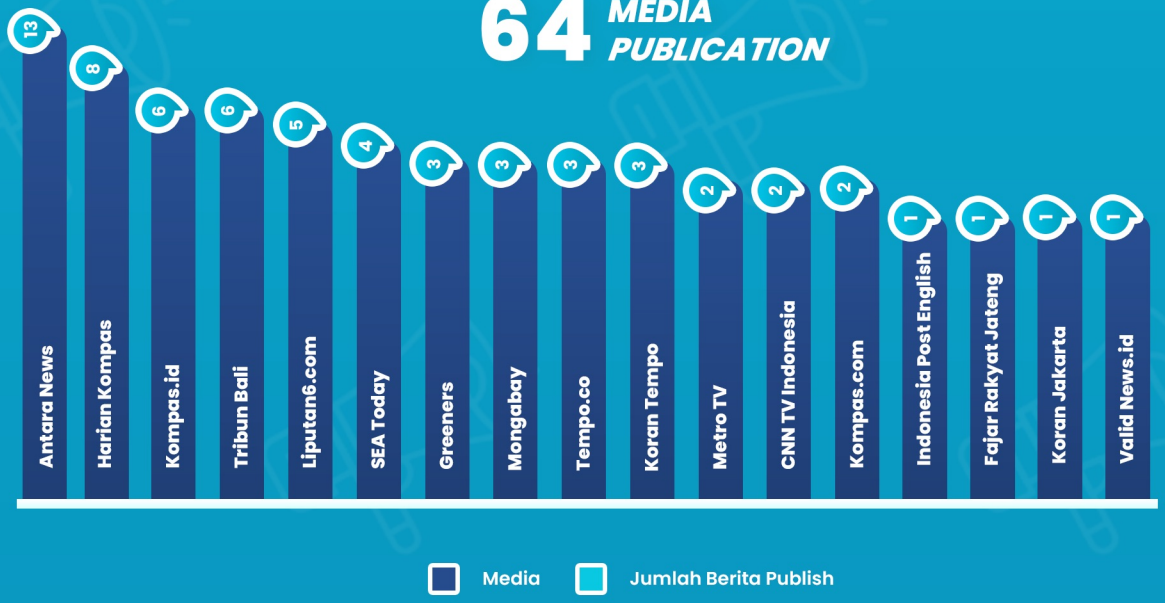

LOKAL

24 MEDIA PUBLICATION

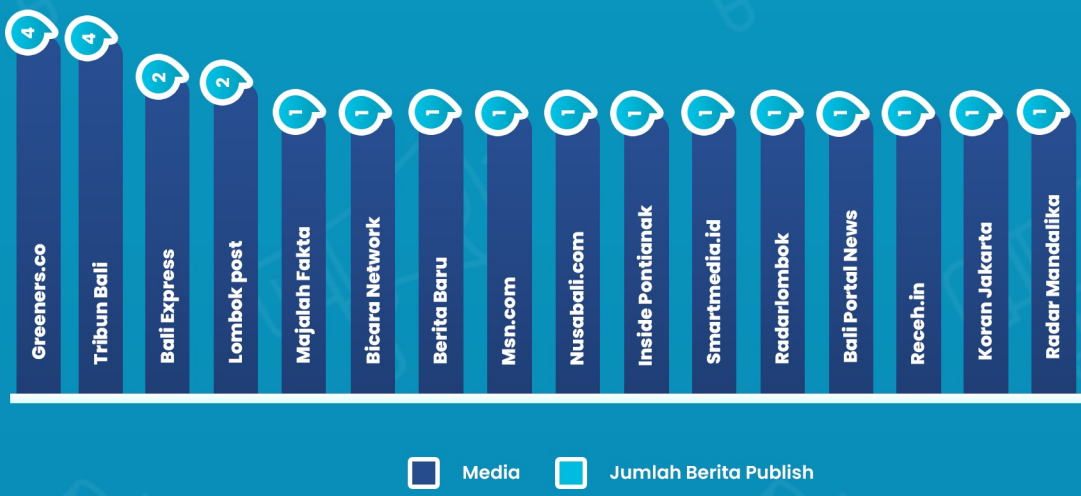

Rencana Kerja

Tahun 2024

ICCTF terus melakukan upaya melalui implementasi program dan proyek pilot dalam rangka menekan emisi gas rumah kaca serta aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui 4 (empat) area fokus (*window*), yaitu *land-based window, energy window, adaptation and resilience window*, serta *marine-based window*. Melihat kepentingan Indonesia di tingkat global dalam hal pembiayaan perubahan iklim, maka berbagai kesempatan perlu dijadikan momentum untuk dapat mendorong ICCTF dalam meningkatkan partisipasi terhadap pengendalian dampak perubahan iklim. Menindaklanjuti hal tersebut, Majelis Wali Amanat ICCTF telah menyepakati milestone setahun kedepan sebagai strategi menuju pembangunan rendah karbon. Garis besar rencana kerja ICCTF tahun 2024 sebagaimana yang telah disusun dalam *Strategic Meeting* di Sentul, Bogor pada bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Q1

LAUTRA:

- *Capacity Building* BFAC dan institusi/Lembaga Keuangan
- Proses pengadaan untuk perusahaan konsultan dan perorangan
- Pengembangan Kerangka Kebijakan

Blue Carbon – AFD:

- Finalisasi pengadaan konsultan
- Memulai *roadmap* Karbon Biru (termasuk studi pustaka, FGD, *meeting*, dan Lokakarya)

Q2

- *Mission* proyek ADB *Aquaculture*, AFD dan LAUTRA
- Audit proyek COREMAP-CTI ADB, AFD dan LAUTRA
- *International Workshop (Our Ocean Conference)*

LAUTRA:

- Lokakarya Pengembangan Strategi MPA, Infrastruktur dan UMKM
- Koordinasi *strategy* keuangan
- *Public Expenditure Review* (PER) mengenai pemanfaatan kembali peluang dana pemerintah.
- Pengembangan Kerangka Kebijakan
- Konsultasi publik *roadmap* dan rancangan peraturan

Blue Carbon – AFD:

- Memulai penilaian kebijakan untuk karbon kredit (termasuk studi pustaka, FGD, meeting, dan Lokakarya).
- *National Workshop in sharing practices with other countries*
- Dimulainya baseline Karbon Biru Nasional (termasuk *Studi Desk* yang relevan, FGD, pertemuan, lokakarya di lokasi proyek)
- *Survey Baseline*

Q3

- Kajian Blue Food
- Kegiatan Analisis Dampak Hibah COREMAP-CTI

LAUTRA:

- Capacity Building BFAC dan institusi/Lembaga Keuangan
- Penyusunan rekomendasi Kebijakan untuk merealisasikan PNBP yang terukur untuk MPA yang terkait dengan karbon biru
- Monitoring & Reporting Framework untuk investasi Biru
- Workshop Integrasi belanja modal dan operasional ke dalam RPJMN
- Sosialisasi Strategi Investasi
- International travel for knowledge sharing

Blue Carbon – AFD:

- FGD, Meeting terkait rekomendasi dan update NDC Capacity building untuk rencana aksi update NDC
- FGD mengenai validasi baseline karbon biru
- Sharing practices terkait pengelolaan karbon biru dengan negara lain

Aquaculture – ADB:

- Kick off meeting
- Proses pengadaan PIU dan konsultan knowledge management

Q4

- Kajian Blue Food
- Kegiatan Analisis Dampak Hibah COREMAP-CTI

LAUTRA:

- Capacity Building BFAC dan institusi/Lembaga Keuangan
- Penyusunan rekomendasi Kebijakan untuk merealisasikan PNBP yang terukur untuk MPA yang terkait dengan karbon biru
- Monitoring & Reporting Framework untuk investasi Biru
- Workshop Integrasi belanja modal dan operasional ke dalam RPJMN
- Sosialisasi Strategi Investasi
  International travel for knowledge sharing

Blue Carbon – AFD:

- FGD, Meeting terkait rekomendasi dan update NDC Capacity building untuk rencana aksi update NDC
- FGD mengenai validasi baseline karbon biru
  Sharing practices terkait pengelolaan karbon biru dengan negara lain

Aquaculture – ADB:

- Kick off meeting
- Proses pengadaan PIU dan konsultan knowledge management

LAPORAN TAHUNAN 2023

Indonesia Climate Change Trust Fund

SUPPORTING THE INDONESIAN GOVERNMENT FOR A BETTER CLIMATE

ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

Sekretariat ICCTF
Gedung Lippo Kuningan, lantai 15
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
Jakarta 12940, Indonesia
E. secretariat@icctf.or.id
T. +62 (21) 8067 9314
F. +62 (21) 8067 9315

@icctfofficial
Indonesia Climate Change Trust Fund